

**Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M):
Studi Kasus Pemberdayaan Perempuan
di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar (1995-2008)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Panitia Sidang Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Bidang Ilmu Sejarah**

Oleh:

**NAJMI
05 181 028**



**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M): Studi Kasus Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dengan periode waktu tahun 1995 sampai 2008. Tahun 1995 merupakan awal terbentuknya LP2M sebagai salah satu LSM di yang berpusat di Kota Padang. Tahun 2008 LP2M melakukan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Batipuh dengan menggunakan jaringan antar kelompok dengan membentuk satu kelompok dampingan besar yang diberi nama "Sarumpun Batuang".

LP2M merupakan salah satu LSM yang fokus kegiatannya pada pemberdayaan perempuan dalam usaha untuk kesetaraan gender. Pemberdayaan ini dituangkan menjadi sebuah pengorganisasian perempuan karena LP2M memfasilitasi terbentuknya kelompok perempuan dan kelompok ini nantinya menjadi kelompok dampingan LP2M. Pembentukan kelompok ini bertujuan agar perempuan bisa berdiskusi dan mengeluarkan pendapatnya mengenai apa saja masalah ketidakadilan bagi kaum perempuan. Misalnya dalam hal mendapatkan pendidikan perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Selain itu pembentukan kelompok ini bertujuan agar perempuan bisa membuka usaha sendiri melalui pinjaman yang dimodali oleh LP2M baik berupa uang maupun hewan ternak.

Dalam melakukan programnya, LP2M mendapat donor dari dalam negeri maupun luar negeri. Donor dalam negeri yaitu YASPPUK dan YPKM, sedangkan donor dari luar negeri yaitu CIDA CANADA, HIVOS, The Ford Foundation, Heifer Project International (HPI), Project Concern International (PCI) dll. Melalui bantuan ini LP2M melaksanakan program dan kegiatannya serta bekerja sama dengan lembaga donor tersebut.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, kearsipan, dan studi lapangan yaitu wawancara langsung dengan nara sumber. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan. Dari penelitian yang telah dilakukan terlihat pengaruh LSM cukup besar terhadap kehidupan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Batipuh terutama kaum perempuan.

Kehadiran LP2M di Kecamatan Batipuh sudah lama yaitu ketika LP2M masih bernama PIPSP (Pusat Informasi dan Pengembangan Swadaya Pedesaan) yang terbentuk pada tahun 1989. Pada tahun 1995 baru berubah menjadi LP2M. Dari segi program PIPSP dan LP2M memiliki persamaan yaitu sama-sama memberdayakan masyarakat terutama masyarakat di pedesaan tetapi perbedaannya LP2M lebih kepada pemberdayaan perempuan dalam usaha untuk kesetaraan gender.

Kegiatan LP2M di Kecamatan Batipuh terhadap kelompok perempuan dampingannya yaitu pemberdayaan dalam bidang ekonomi, pemberdayaan di bidang sosial politik dan pemberdayaan di bidang kesehatan dan lingkungan. Dalam bidang ekonomi LP2M memberikan bantuan melalui pinjaman, di bidang sosial politik LP2M mengadakan pelatihan seperti pelatihan gender, dan di bidang kesehatan dan lingkungan LP2M mengadakan kegiatan seperti pembuatan pupuk kompos. Dengan kegiatan tersebut memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat terutama masyarakat di Kecamatan Batipuh karena dapat menambah pengetahuan dan wawasan mereka.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai sebuah organisasi masyarakat sipil yang sebelumnya tidak begitu “diminati” - pasca tahun 1998 menjadi sebuah organisasi yang sangat populer dan dalam kurun waktu sangat singkat berdiri dalam jumlah besar di Indonesia. Fenomena ini juga melanda Sumatera Barat dengan munculnya nama-nama baru yang menyebut dirinya LSM. Pertumbuhan LSM yang sedemikian pesat, dipandang sebagai era bangkitnya masyarakat sipil di Indonesia. Di sisi lain kesempatan ini telah dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk berbagai kepentingan.¹

Sampai tahun 2008, Sumatera Barat telah melakukan pendataan dan pencatatan yang dilakukan Badan Kesbangpol & Linmas Prov. Sumatera Barat yaitu menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas dan LSM. Berdasarkan kegiatan tersebut terdapat 419 LSM yang tersebar di seluruh kodya dan kabupaten.²

¹ KPMM (Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani), *Memperkuat Integritas LSM/ORNOP Melalui Pembentukan Diri Sendiri*, hlm. 2.

² Tita Shania dalam sumbarprov.go.id, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ormas dan LSM di Sumatera Barat. Dalam kegiatan dimaksud ada sebanyak 419 LSM, dengan rincian sebagai berikut: Kab. Pasaman 25 LSM; Kab. Agam 17 LSM; Kab. Lima Puluh Kota 34 LSM; Kab. Tanah Datar 6 LSM; Kab. Padang Pariaman 50 LSM; Kab. Pesisir Selatan 9 LSM; Kab. Solok 9 LSM; Kab. Sijunjung 8 LSM; Kab. Solok Selatan 24 LSM; Kab. Pasaman Barat 17 LSM; Kab. Kep. Mentawai 8 LSM; Kota Bukittinggi 76 LSM; Kota Padang Panjang 3 LSM; Kota Solok 11 LSM; Kota Payakumbuh 28 LSM; Kota Sawahlunto 19 LSM dan kota Padang sendiri ada 51 LSM. Tanggal terbit di internet 11 Februari 2009. Diambil pada tanggal 1 Maret 2009.

Pesatnya pertumbuhan LSM dipandang sebagai era “bangkitnya” masyarakat sipil juga kebebasan-kebebasan dasar warga negara seperti kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat kembali dipulihkan. Pertumbuhan LSM yang pesat ternyata tidak senantiasa sama dengan pemahaman dan penguatan jati diri LSM secara benar. Hal ini dapat berdampak buruk bagi LSM, antara lain timbulnya pandangan negatif dan menurunnya kepercayaan publik terhadap LSM, sehingga merugikan citra dan keberadaan LSM secara keseluruhan.³

LSM hadir di setiap bidang kehidupan dan dalam beberapa kasus menjadi penggerak utama perubahan di dalamnya. Peranan LSM adalah melakukan apa yang tidak dilakukan oleh pemerintah yang selama ini menjadi pengendali perubahan dalam skala besar atau melakukan hal yang sama dengan pemerintah tetapi dengan cara yang berbeda. Mempertimbangkan semangat yang hendak menciptakan perbedaan ini, wajar untuk menyebut LSM sebagai salah satu pendorong dinamika sosial dan politik suatu masyarakat.⁴

LSM merupakan satu dari sekian komunitas dalam masyarakat yang menjadi pelaku reformasi, masih banyak komunitas lain seperti mahasiswa, pekerja serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Biasanya komunitas selain LSM dalam mengaktualisasikan aspirasinya menggunakan cara berdemonstrasi atau unjuk rasa, tentu saja hal ini dimaksudkan agar aspirasi yang disuarakan dapat terlihat dan terdengar oleh sasaran maupun masyarakat pada umumnya. Cara berdemonstrasi dengan mengerahkan massa ini kerap juga dilakukan oleh LSM. Biasanya LSM yang

³ Tim Studi Banding LSM, *Menjadi LSM Akuntabel : Belajar dari Masyarakat Sipil Filipina*, (Padang: Konsorium Pengembangan Masyarakat Madani, 2005), hlm. 4.

⁴ *Ibid*, hlm. 5.

melakukan demonstrasi hanya mengusung “persoalan” yang derajat kepentingan umumnya sangat rendah, bahkan lebih banyak pesan sponsornya.⁵

Bermunculannya LSM juga melanda Sumatera Barat. Salah satu LSM yang ada di Sumatera Barat adalah LP2M (Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat). Ketidakadilan dalam bidang sosial merupakan fokus sebuah LSM dalam membangun lembaganya. Selain itu berbagai tujuan yang mereka lakukan untuk membangun organisasi ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat walaupun di balik itu semua masih ada kritik pedas terhadap LSM.

Ide dasar pendirian LP2M ini bermula dari diskusi-diskusi yang diikuti oleh beberapa aktifis LSM di Kota Padang pada tahun 1995. Tema-tema diskusi yang beragam mulai dari dampak negatif pembangunan terhadap masyarakat sampai persoalan ketidakadilan gender. Berawal dari diskusi-diskusi tersebut terbangun sebuah kepedulian, komitmen dan visi bersama untuk membangun sebuah gerakan bersama dalam mewujudkan transformasi sosial, terutama perempuan di Sumatera Barat. LP2M merupakan wahana untuk implementasi kepedulian dan komitmen tersebut. Langkah awal ini dimulai oleh tiga orang Pengurus Harian yaitu: Slamet Rahmadi sebagai ketua, Lusi Herlina sebagai sekretaris dan Fitriyanti sebagai bendahara serta beberapa orang pengurus secara swadaya.⁶

LP2M didirikan oleh lima orang aktifis LSM yang dulunya sudah menjadi anggota dari LSM lain yaitu Pusat Informasi dan Pengembangan Swadaya Pedesaan

⁵ Abdul Fickar Hadjar dalam fickar15.blogspot.com, makalahnya yang berjudul: Pertumbuhan LSM, Demonstrasi, dan Demokrasi Era Reformasi (disampaikan pada “Diskusi Implementasi Kebebasan Berbicara & Berserikat”, Kesbang DKI Jakarta, 18 Juli 2006, Hotel Puncak Jaya, Bogor). Terbit di internet tanggal 18 Juli 2006. Diambil pada tanggal 15 Februari 2009.

⁶ Profil LP2M berdasarkan arsip dan wawancara dengan Direktur Eksekutif LP2M yaitu: Dwi Bertha bertempat di Kota Padang pada tanggal 3 Maret 2009.

(PIPSP) yang berdiri tahun 1989. Pendiri LP2M ini yaitu Lusi Herlina, Orbavianus Harefa, Fitriyanti, Efni Rosita dan Rahmadi. Mereka mendirikan LP2M karena pada tahun 1995 belum ada LSM yang fokus kegiatannya pada perempuan atau kesetaraan gender di Sumatera Barat. Mereka membubarkan PIPSP pada tahun 1995 yang sebelumnya mereka geluti dan kemudian mendirikan LP2M.⁷

LP2M berdiri pada tanggal 7 September 1995 di Kota Padang. Secara yuridis, LP2M berbadan hukum yayasan dengan Akta Pendirian pada Notaris Frida Damayanti S.H pada tanggal 7 September 1995 di Kota Padang. Setelah Musyawarah Besar (Mubes) tanggal 19 November 2006 badan hukum LP2M berubah menjadi perkumpulan.⁸ Perubahan bentuk badan hukum ini berawal dari diskusi yang diadakan pada tanggal 7 Februari 2004. Dalam diskusi tersebut membahas bahwa LP2M yang berbadan hukum yayasan dan terikat oleh Undang-undang No.16 tahun 2001 memiliki kekurangan yaitu spirit atau semangat demokrasinya berbeda dengan historikal anggotanya namun kelebihan adalah sudah mempunyai undang-undang. Diskusi ini diikuti oleh para pendiri LP2M di antaranya: Lusi Herlina, Rahmadi, Fitriyanti serta dua anggota LP2M yaitu Obe dan Syaf. Pada diskusi tersebut masih menetapkan bahwa LP2M berbadan hukum yayasan.⁹

Program LP2M bergerak di bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melakukan pengorganisasian terhadap perempuan yaitu dengan

⁷ Wawancara dengan Lusi Herlina bertempat di Kota Padang pada tanggal 3 Maret 2009, merupakan salah seorang pendiri LP2M.

⁸ Akta Pendirian pada Notaris Frida Damayanti S. H., SK Menteri Kehakiman RI. No. C. 166. HT. 03. 01. Th. 1994. Akta Pendirian Yayasan "Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) tanggal 7 September 1995. No. 02. (Lihat Lampiran 3 dan lampiran 6).

⁹ Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pelaksana Harian LP2M (Periode Maret 2002-Juni 2004).

BAB V

KESIMPULAN

Upaya-upaya pemberdayaan yang terorganisasi melalui kelompok-kelompok perempuan sebagai pihak ketiga, bertujuan untuk memperbaiki nasib para perempuan yang dianggap menjadi 'korban' ketidakadilan gender. Caranya adalah dengan membangun atau memberikan kemampuan yang memungkinkan kelompok-kelompok perempuan tersebut mendapatkan kekuatan untuk mengungkapkan, membela dan memperjuangkan kepentingannya di dalam konteks struktur sosial, ekonomi, dan politik yang sering merugikan mereka. Dengan demikian, pemberdayaan perempuan dapat dilihat sebagai upaya untuk melakukan perubahan. Kelompok pemberdayaan perempuan biasanya menjadikan penguatan ekonomi sebagai pintu masuk untuk membenahi relasi dengan laki-laki, yang dipadukan dengan proses membangun kesadaran dan pengorganisasian kolektif.

LP2M melakukan pemberdayaan terhadap perempuan yaitu berupa pengorganisasian perempuan. Pengorganisasian dilakukan mulai dari kelompok kecil hingga jaringan antar kelompok, di tingkat kota/kabupaten. Kemampuan dalam mempengaruhi dan melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan di semua tingkatan menjadi tahapan tertinggi dalam penguatan perempuan. Adapun tujuan pengorganisasian ini terlihat dari strategi program LP2M yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang kritis dan mandiri.

Pengorganisasian perempuan ini juga disebut sebagai kelompok dampingan LP2M. Penguatan kelompok dilakukan melalui pendampingan oleh staf lapangan dan

pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh wakil dari anggota kelompok baik dalam kelompok sendiri maupun dari luar kelompok dan studi banding ke kelompok lain. Pendampingan dilakukan melalui pertemuan bulanan kelompok ataupun kunjungan lapangan. Dalam pertemuan bulanan juga dilakukan diskusi-diskusi untuk membangun kesadaran kritis anggota atas persoalan-persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Kunjungan lapangan beberapa staf lapangan LP2M memantau kegiatan satu kali sebulan di daerah kelompok dampungannya yaitu di Kecamatan Batipuh. Di Kecamatan Batipuh terdapat beberapa kelompok dampingan yang tersebar di tiga nagari yaitu Nagari Bungo Tanjung, Nagari Gunung Rajo dan Nagari Batipuh Baruah.

Pertemuan bulanan ini juga disebut sebagai pertemuan regular karena pertemuan ini rutin diadakan sekali dalam sebulan. Pertemuan ini bertujuan untuk penguatan kelompok dan ajang silaturahmi bagi anggota kelompok untuk membahas masalah yang terjadi di tempat tinggal mereka.

Di dalam pertemuan tersebut LP2M memfasilitasi untuk mengadakan diskusi dan pelatihan. Pelatihan tersebut biasanya diadakan di Kota Padang dan Kecamatan Batipuh. Pelatihan dan diskusi ini juga diadakan satu kali dalam dua bulan. Selain dari diskusi LP2M melakukan pemberdayaan di beberapa bidang yaitu pemberdayaan di bidang ekonomi, pemberdayaan di bidang sosial politik dan pemberdayaan di bidang kesehatan dan sanitasi lingkungan.

Kegiatan yang dilakukan LP2M di Kecamatan Batipuh memiliki dampak yang positif bagi anggota kelompok dampungannya. Mereka yang umumnya petani dan peternak serta pedagang dapat terbantu dari segi ekonomi karena LP2M

memberikan pinjaman baik itu berupa uang maupun ternak. Dengan bantuan berupa pinjaman ini masyarakat dapat menjalankan usahanya dengan lancar ini terbukti dari wawancara yang telah dilakukan terhadap anggota kelompok dampingan di Kecamatan Batipuh sendiri.

Di bidang sosial politik mereka diberi pelatihan dan diskusi yang berhubungan dengan bidang sosial maupun politik. Misalnya pelatihan kewarganegaraan, pelatihan gender dan partisipasi politik perempuan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di tingkat nagari maupun daerah. Anggota kelompok yang juga sebagai ibu rumah tangga tidak hanya bergelut dengan kegiatan rumah tangga saja tetapi melalui diskusi dan pelatihan ini mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang nantinya bermanfaat bagi anak-anak mereka kelak.

Walaupun berbagai diskusi dan pelatihan yang dilakukan oleh LP2M dari segi sosial dan politik namun kedudukan perempuan dari segi adat dan kebiasaan masih jauh dari yang diharapkan. Misalnya Bundo Kandung yang diikutsertakan dalam rapat nagari masih sebagai simbol dan pengetahuan tentang adat yang dimilikinya masih dianggap rendah oleh kaum adat laki-laki. Perempuan masih dianggap memiliki pengetahuan yang rendah dalam hal adat sehingga perempuan menjadi rendah diri.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip-arsip

- Akta Pendirian pada Notaris Frida Damayanti S. H., SK Menteri Kehakiman RI. No. C. 166. HT. 03. 01. Th. 1994. Akta Pendirian Yayasan "Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) tanggal 7 September 1995. No. 02
- Anggaran Dasar LP2M yang terdiri atas VI Bab dan 20 pasal Periode 2002-2004
- Anggaran Dasar LP2M No. 05 tanggal 09 Juli 2008
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana Harian LP2M Periode 1 April 1996-31 Desember 1999
- Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengurus LP2M Periode Januari 2000-Desember 2001
- Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pelaksana Harian LP2M Periode Maret 2002-Juni 2004
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana LP2M Periode Juli 2004-November 2006 disampaikan dalam Rapat Organisasi LP2M 17-19 November 2006
- Laporan Tahunan LP2M Periode Januari-Desember 2008
- Notulensi Rancangan Peraturan Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

Buku-buku

- A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Gerakan Anti-Kekerasan terhadap Perempuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1998
- A. Nunuk Prasetyo Murniati, *Getar Gender*, Magelang: Indonesiatara, 2004
- Amelia Fauzia, Jajat Burhanuddin, dan Oman Fathurahman, *Tentang perempuan Islam: Wacana dan Gerakan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Astrid Anugrah, *Keterwakilan Perempuan dalam Politik*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009